

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk Muslim di dunia. Data Badan Pusat Statistik tahun 2015 mencatat sebanyak 207,2 juta jiwa (87,18%) beragama Islam. Perkembangan sistem ekonomi syariah di Indonesia dimulai dari lahirnya bank syariah pertama pada tahun 1991 yang kemudian resmi beroperasi di tahun 1992. Perbankan syariah menjadi garda terdepan dari sistem ekonomi syariah itu sendiri, dikarenakan 75% share dari keuangan syariah adalah perbankan. Akan tetapi, pertumbuhan dari perbankan syariah di Indonesia dalam dua dasawarsa terakhir menunjukkan data yang stagnan. Data Otoritas Jasa Keuangan per September 2015 menunjukkan market share perbankan syariah yang hanya mencapai angka 5% dari seluruh aset perbankan. Serta Global Islamic Economic Index 2013 yang mengukur perkembangan perekonomian Islam di seluruh dunia menempatkan Indonesia di peringkat 10, jauh dari Malaysia (Reuters dan Standard, 2014: 23). Penyebab rendahnya peringkat Indonesia pada Global Islamic Economic Index adalah rendahnya literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia (Wahyuni, 2016:2).

Literasi keuangan adalah kemampuan seseorang dalam mengelola keuangannya (Chen dan Volpe, 1998). Literasi keuangan merupakan kesadaran dan pengetahuan tentang produk -produk keuangan, lembaga keuangan, dan konsep mengenai keterampilan dalam mengelola keuangan (Lisa XU dan Bilal Zia, 2012). Menurut Otoritas Jasa Keuangan dalam Rancangan Peraturan OJK 2016 menyatakan bahwa literasi keuangan adalah rangkaian proses atau aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan, keyakinan, dan keterampilan, yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan.

Masyarakat Indonesia memiliki tingkat literasi keuangan (melek keuangan) yang rendah, sehingga pengetahuan pengelolaan keuangan dan pengetahuan produk keuangan masih terbatas. Akibatnya, akses masyarakat terhadap lembaga keuangan baik konvensional maupun syariah masih rendah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan informasi mengenai kondisi akses masyarakat Indonesia ke lembaga keuangan formal yang rendah dibandingkan dengan negara-negara di Asia. Berdasarkan data yang diteliti oleh Worldbank (2011), Indonesia menempati urutan terakhir dengan persentase sebesar 20% dan berada di bawah negara Filipina.

Tabel 1. 1

## Tingkat Penggunaan Produk Keuangan

No	Negara	Tingkat penggunaan produk keuangan
1.	Singapura	98%
2.	Thailand	73%
3.	Malaysia	66%
4.	India	35%
5.	Philipina	27%
6.	Indonesia	20%

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan 2013

Survei Nasional Literasi Keuangan Indonesia tahun 2013 menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia untuk perbankan sendiri yang tergolong *well literate* hanya sebesar 21,8%, *sufficient literate* sebesar 75,44%, *less literate* sebesar 2,04% dan *not literate* sebesar 0,73%, dengan tingkat penggunaan produk dan jasa keuangan perbankan sebesar 57,28%. Angka tersebut menggambarkan bahwa tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia masih rendah dan banyak masyarakat Indonesia yang belum mengakses produk dan jasa keuangan.

Tabel 1. 2

## Indeks Literasi dan Indeks Utilitas Sektor Keuangan

	Perbankan	Asuransi	Perusahaan Pembiayaan	Dana Pensiun	Pasar Modal	Pegadaian
<i>Well Literate</i>	21.80%	17.84%	9.80%	7.13%	3.79%	14.58%
<i>Sufficient Literate</i>	75.44%	41.69%	17.89%	11.74%	2.40%	38.89%
<i>Less Literate</i>	2.04%	0.68%	0.21%	0.11%	0.03%	0.83%
<i>Not Literate</i>	0.73%	39.80%	72.10%	81.03%	93.79%	45.44%
<i>Utilitas</i>	57.28%	11.81%	6.33%	1.53%	0.11%	5.04%

Sumber: Survei Nasional Literasi Keuangan, EPK, 2013

Tingkat literasi keuangan di Indonesia dikategorikan ke dalam tingkatan yang rendah dibandingkan dengan negara lain. Hal ini terungkap dalam survei yang dilakukan oleh Visa (2012) mengenai Visa International Financial Literacy Barometer yang dilakukan di 28 negara. Survei tersebut memberikan informasi bahwa Indonesia berada pada posisi ke 27 dengan skor 27,7 berada di bawah Negara Vietnam. Adapun di peringkat tiga teratas dari survei tersebut adalah Brazil, Meksiko, dan Australia. Survei dilakukan terhadap 25.500 partisipan di 28 negara sepanjang Februari–April 2012.

Kecerdasan finansial menjadi salah satu aspek penting dalam kehidupan. Kecerdasan finansial adalah kecerdasan dalam mengelola asset pribadi (Widayati, 2012). Nidar dan Bestari (2012) menjelaskan bahwa perekonomian nasional tidak akan berpengaruh pada krisis keuangan global jika masyarakat memahami sistem keuangan. Rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat merupakan salah satu faktor yang menyebabkan krisis keuangan terjadi (INFE dalam OECD, 2012:7). Maka dari itu,

pemahaman literasi keuangan terutama literasi keuangan syariah diperlukan bagi setiap individu.

Literasi keuangan syariah menjadi hal yang sangat penting bagi seorang individu, menurut Mahadzhir Ahmad (2010) menyebutkan beberapa alasan pentingnya literasi keuangan syariah. *Pertama*, setiap individu harus menjaga uang yang sudah mereka cari, jangan sampai uang yang sudah dicari dengan susah payah dihabiskan untuk hal-hal yang tidak penting ataupun menjadi sasaran penipuan orang-orang jahat yang hendak membohongi individu untuk melakukan investasi abal-abal. Karena terdapat banyak penyedia jasa keuangan yang mengambil keuntungan dari *client* yang tidak memiliki literasi keuangan syariah yang memadai. Orang yang mempunyai tingkat literasi keuangan yang rendah akan mudah dibohongi dalam menggunakan uangnya. *Kedua*, semakin banyaknya jenis produk keuangan syariah yang ada sehingga, individu dituntut untuk mengetahui jenis produk yang sesuai dan bermanfaat bagi individu. *Ketiga*, setiap individu lebih mengetahui kebiasaan dan emosionalnya dalam menghabiskan uang sehingga, yang bisa mengontrol keuangan dan manajemen keuangan kembali lagi ke individu yang bersangkutan. *Keempat*, Muslim harus peduli terhadap larangan riba, maysir, gharar dan hal-hal lain yang sudah diharamkan oleh Islam. Karena menaati larangan yang sudah ditentukan oleh Allah hukumnya wajib bagi seorang muslim. Literasi keuangan syariah menjadi modal untuk membangun sistem keuangan syariah yang lebih baik bagi suatu Negara.

Indonesia dengan tingkat literasi keuangan yang rendah terus berupaya untuk mengedukasi masyarakat akan pentingnya literasi keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memprioritaskan peningkatan literasi keuangan untuk ibu rumah tangga dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Peningkatan didasarkan pada hasil survei OJK tahun 2013 yang menunjukkan rendahnya literasi dan utilitas di sektor keuangan (Republika, 2016). Edukasi literasi keuangan bagi UMKM menjadi suatu program strategis OJK dalam meningkatkan penggunaan produk lembaga keuangan dan UMKM sebagai prioritas sasaran edukasi literasi keuangan. Pentingnya peranan sektor UMKM dalam mendukung pertumbuhan perekonomian tersebut mengharuskan dilakukannya penguatan kapasitas UMKM. Salah satu bentuk penguatan tersebut adalah dengan meningkatkan kemampuan UMKM dalam mengelola keuangan dan usahanya serta memperluas akses keuangan bagi usaha kecil tersebut. Akses terhadap layanan jasa keuangan seperti tabungan, kredit, asuransi, fasilitas pembiayaan dan transaksi keuangan lainnya akan sangat membantu kelompok marjinal dan berpendapatan rendah untuk meningkatkan pendapatannya, mengakumulasi kekayaan, mengelola risiko, serta melakukan upaya untuk keluar dari kemiskinan. Dengan lebih terbukanya akses keuangan bagi masyarakat di suatu daerah maka diharapkan dapat lebih mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih merata, partisipatif, dan inklusif.

Menurut Dani Surya Sinaga ketika masih menjabat sebagai Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta, literasi keuangan disektor UMKM, penting dilakukan dengan harapan mampu meningkatkan pembiayaan produktif di daerah Yogyakarta. Hal itu juga mengingat 90 persen roda perekonomian DIY digerakkan oleh sektor UMKM (Jogja Antaranews, 2016). Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri memiliki jumlah UMKM yang banyak dengan jenis usaha sektor yang berbeda-beda. Dengan jumlah tersebut, diharapkan dapat menjadi penopang ekonomi rakyat dan dapat dilihat pada tabel, dari tahun ke tahun mengalami peningkatan jumlah UMKM.

Tabel 1. 3  
Jumlah Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Daerah Istimewa Yogyakarta  
Tahun 2009-2013

No	Jenis Usaha Menurut Sektor	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Aneka Usaha	34.009	39.036	43.471	43.976	44.452
2	Perdagangan	48.292	52.420	57.858	58.363	58.601
3	Industri Pertanian	46.017	49.554	54.991	55.496	55.767
4	Industri Non Pertanian	36.529	41.222	45.655	46.160	46.390
Jumlah		164.847	182.232	201.975	203.995	205.210

Sumber: Disperindagkop dan UMKM DIY, 2015

Para pelaku UMKM membutuhkan kecakapan tentang bagaimana pengelolaan, perencanaan keuangan dan pengetahuan mengenai produk-produk jasa keuangan syariah sehingga bermanfaat dalam mengembangkan

usahanya dan tidak mudah tertipu oleh investasi abal-abal. Literasi keuangan merupakan harga mati yang harus dipahami pelaku UMKM agar pengambilan keputusan keuangan dilakukan secara bijaksana (Cahyono, 2012). Sehingga, UMKM yang ada di DIY dapat berkembang menjadi lebih baik.

Berdasarkan latar belakang tersebut mengenai pentingnya literasi keuangan syariah untuk setiap individu terutama pelaku UMKM yang menjadi penopang ekonomi, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai tingkat literasi keuangan syariah para pelaku UMKM yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan judul **“ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT LITERASI KEUANGAN SYARIAH PADA PELAKU UMKM DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”**.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Dari latar belakang yang sudah dituliskan, beberapa rumusan masalah mengenai tingkat literasi keuangan syariah pada pelaku UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta:

1. Bagaimana tingkat literasi keuangan syariah pada pelaku UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Apakah gender mempengaruhi tingkat literasi keuangan syariah pada pelaku UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta?



3. Apakah latar belakang pendidikan mempengaruhi tingkat literasi keuangan syariah pada pelaku UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta?
4. Apakah jumlah pendapatan mempengaruhi tingkat literasi keuangan syariah pada pelaku UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta?
5. Apakah lokasi usaha mempengaruhi tingkat literasi keuangan syariah pada pelaku UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta?
6. Apakah keterkaitan responden terhadap lembaga keuangan konvensional atau syariah mempengaruhi tingkat literasi keuangan syariah pada pelaku UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta?

### **C. TUJUAN DAN KEGUNAAN**

Tujuan penelitian kali ini, diantaranya:

1. Untuk mengetahui tingkat Literasi Keuangan syariah pada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui apakah gender mempengaruhi tingkat Literasi Keuangan syariah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Untuk mengetahui apakah latar belakang pendidikan mempengaruhi tingkat Literasi Keuangan syariah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Untuk mengetahui apakah jumlah pendapatan mempengaruhi tingkat Literasi Keuangan syariah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Untuk mengetahui apakah lokasi usaha mempengaruhi tingkat Literasi Keuangan syariah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Untuk mengetahui apakah keterkaitan responden terhadap lembaga keuangan konvensional atau syariah mempengaruhi tingkat Literasi Keuangan syariah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

1. Pelaku UMKM, sebagai evaluasi dan solusi untuk meningkatkan pemahaman akan keuangan syariah dan penggunaan produk-produk perbankan syariah.
2. Pemerintah dan perbankan, sebagai bahan referensi untuk merumuskan strategi dalam meningkatkan pemahaman literasi keuangan syariah dan penggunaan produk-produk perbankan syariah pelaku UMKM.

#### **D. SISTEMATIKA PEMBAHASAN**

1. BAB I: Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah mengenai pentingnya literasi keuangan syariah untuk pelaku UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta, rumusan masalah dan tujuan penelitian.

2. BAB II: Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teori

Bab ini berisi mengenai penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang mengukur dan menganalisis faktor yang mempengaruhi tingkat literasi keuangan syariah pada pelaku UMKM di Daerah

Istimewa Yogyakarta, dan kerangka teori yang mendukung penelitian tersebut.

### 3. BAB III: Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan *ordinal logistic regression*, lokasi penelitian di Daerah Istimewa Yogyakarta, populasi penelitian ini adalah para pelaku UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta, pengumpulan data melalui kuesioner.

### 4. BAB IV: Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisi mengenai pembahasan dari hasil penelitian yang menggunakan analisis deskriptif dan *ordinal logistic regression*, dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan mengenai tingkat literasi keuangan syariah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya tingkat literasi keuangan syariah pelaku UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta.

### 5. BAB V: Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan, saran-saran dan rekomendasi untuk perbaikan yang bersangkutan.